

## Efektivitas Peningkatan Kemitraan UMKM sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Kota Tangerang

Triya Hanjani<sup>1</sup>, Diva Livia Wulandari<sup>2</sup>, Yolanda Zenia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: [6670240014@student.untirta.ac.id](mailto:6670240014@student.untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [6670240015@student.untirta.ac.id](mailto:6670240015@student.untirta.ac.id)<sup>2</sup>,  
[6670240018@student.untirta.ac.id](mailto:6670240018@student.untirta.ac.id)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 11 Januari 2026

Revised: 21 Januari 2026

Accepted: 25 Januari 2026

### Keywords:

Efektivitas  
Kebijakan, Pemberdayaan  
Masyarakat, UMKM

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kemitraan UMKM sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan desain studi kepustakaan, penelitian ini mengevaluasi desain kebijakan, proses implementasi, dan dampak program melalui data sekunder dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan Pemkot Tangerang, seperti program "Tangerang Emas" dan Perwal No. 56 Tahun 2022, masih didominasi oleh pendekatan bantuan permodalan dan fasilitasi legalitas administratif, bukan pembentukan kemitraan rantai pasok dengan industri besar. Pada tahap implementasi, ditemukan hambatan berupa ketidakakuratan data kurasi UMKM, pelatihan yang bersifat homogen, serta pola komunikasi satu arah. Dari sisi dampak, intervensi pemerintah terbukti bermanfaat untuk kelangsungan usaha dasar, namun belum efektif meningkatkan omzet atau memperluas akses pasar secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang perlu mereformasi perannya dari sekadar "penyedia" bantuan menjadi "fasilitator" yang aktif menjembatani kolaborasi bisnis konkret antara UMKM dan sektor industri.

## PENDAHULUAN

Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam arsitektur perekonomian Indonesia tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama penopang stabilitas ekonomi dan sosial. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) secara konsisten mengafirmasi peran monumental ini: sektor UMKM berkontribusi terhadap 61,07% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan secara impresif mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja. Dalam konteks ketahanan nasional, UMKM terbukti menjadi "jaring pengaman sosial" (social safety net) yang paling resilien, terutama dalam menghadapi guncangan ekonomi makro. Kapasitas mereka untuk bertahan dan beradaptasi melampaui korporasi besar yang seringkali lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global. Namun, di balik kontribusi agregat yang masif tersebut, tersembunyi sebuah paradoks: kerentanan struktural yang kronis di tingkat

individual usaha. Studi empiris dalam lima tahun terakhir secara konsisten mengidentifikasi serangkaian hambatan klasik yang menghambat UMKM untuk "naik kelas". Permasalahan ini meliputi: (1) Keterbatasan akses terhadap permodalan formal; (2) Rendahnya literasi digital dan adopsi teknologi; (3) Standar kualitas produk dan manajemen yang belum terstandarisasi; dan (4) yang paling krusial, lemahnya integrasi pasar dan minimnya jangkauan kemitraan strategis (Suryani *et al.*, 2022). Tanpa adanya jembatan penghubung ke pasar yang lebih luas, baik itu korporasi besar, pasar ekspor, maupun rantai pasok digital, UMKM akan selamanya terperangkap dalam "pasar lokal" yang jenuh dan berdaya saing rendah. Kondisi ini menegaskan bahwa intervensi eksternal menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam kerangka desentralisasi dan Otonomi Daerah, tanggung jawab untuk melakukan intervensi ini secara presisi terdelegasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Di sinilah letak urgensi untuk merumuskan ulang konsep "pemberdayaan". Secara teoretis, konsep pemberdayaan masyarakat (community empowerment) telah mengalami evolusi signifikan. Model pemberdayaan konvensional yang bersifat top-down dan karitatif (seperti pemberian hibah tunai dan bantuan alat produksi sporadis) terbukti tidak efektif dalam menciptakan kemandirian struktural. Model ini seringkali hanya menghasilkan ketergantungan baru dan tidak menyelesaikan akar masalah struktural (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2022). Teori pemberdayaan modern, seperti yang dikembangkan oleh Jim Ife atau Robert Chambers, menekankan pergeseran peran pemerintah dari "penyedia" (provider) menjadi "fasilitator" dan "enabler" (Suharto, 2021). Pemberdayaan yang visioner adalah proses memampukan (enabling) masyarakat—dalam hal ini UMKM—untuk mengakses sumber daya, membangun kapasitas, dan yang terpenting, memiliki kontrol atas masa depan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, kemitraan muncul sebagai instrumen pemberdayaan yang paling strategis dan berkelanjutan. Kemitraan, yang didefinisikan sebagai kolaborasi saling menguntungkan antara UMKM dengan pelaku usaha yang lebih besar (pola inti-plasma, rantai pasok, co-branding, dll.), secara simultan mampu mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi UMKM. Melalui kemitraan, UMKM tidak hanya mendapatkan "pasar" yang pasti (market linkage), tetapi juga terstimulasi untuk melakukan transfer teknologi, meningkatkan standar kualitas produk (Quality Control), dan memperbaiki manajemen usaha (Susanto & Rakhmadi, 2024). Model ideal dari intervensi ini sering dirumuskan dalam kerangka "Penta-Helix", di mana Pemerintah Daerah berperan sebagai orkestrator yang menjembatani kolaborasi antara UMKM (Komunitas), Perusahaan Besar (Bisnis), Akademisi, dan Media (Putra *et al.*, 2023).

Kota Tangerang menyajikan sebuah "laboratorium" yang ideal untuk menguji efektivitas model pemberdayaan berbasis kemitraan ini. Sebagai salah satu kota penyangga utama dalam megapolitan Jabodetabek, Kota Tangerang memiliki profil ekonomi yang unik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang pada tahun 2023 tercatat impresif, seringkali melampaui rata-rata nasional, didukung oleh dominasi sektor Industri Pengolahan serta Perdagangan dan Jasa (BPS Kota Tangerang, 2024). Di satu sisi, Kota Tangerang adalah rumah bagi ribuan Industri Skala Besar dan Menengah (IBS). Data BPS (2023) menunjukkan bahwa Kota Tangerang merupakan salah satu konsentrator industri manufaktur terbesar di Indonesia. Di sisi lain, data Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang (2023) mencatat keberadaan lebih dari 130.000 pelaku UMKM yang aktif di wilayah tersebut. Kondisi ini menciptakan sebuah potensi sinergi yang luar biasa: 130.000 UMKM hidup berdampingan dengan ribuan korporasi besar. Secara teoretis, ini adalah ekosistem sempurna bagi Pemda untuk menjalankan peran fasilitator kemitraan. Pemerintah Kota Tangerang sendiri telah menunjukkan kesadaran akan potensi ini dengan meluncurkan berbagai program, seperti "Tangerang Emas" (Entrepreneur Mandiri Sejahtera) dan fasilitasi gerai UMKM di berbagai pusat keramaian.

Namun, keberadaan program-program tersebut memunculkan pertanyaan penelitian yang kritis: (1) Apakah program pemberdayaan UMKM yang dirancang Pemkot Tangerang telah secara spesifik dan efektif menggunakan instrumen kemitraan sebagai strategi utamanya? (2) Atau, apakah program tersebut masih terjebak dalam model lama (pelatihan fragmentaris, bantuan alat, dan pameran seremonial) yang gagal menciptakan dampak struktural? (3) Sejauh mana "visi" pemberdayaan Pemkot Tangerang telah terealisasi dalam bentuk kemitraan yang nyata, berkelanjutan, dan benar-benar memberdayakan pelaku UMKM dari perspektif mereka sendiri? Meskipun studi mengenai UMKM di Kota Tangerang telah banyak dilakukan, mayoritas berfokus pada aspek adopsi teknologi digital (Pradana & Hapsari, 2022) atau dampak pelatihan terhadap kinerja (Hidayat, 2024). Terdapat kesenjangan riset (research gap) yang nyata terkait evaluasi mendalam terhadap efektivitas kemitraan sebagai instrumen kebijakan pemberdayaan yang diorkestrasi oleh pemerintah daerah.

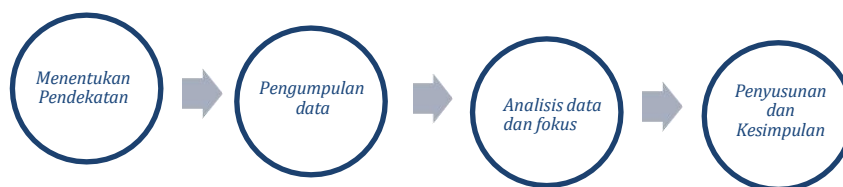
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya peningkatan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kota Tangerang. Secara spesifik, jurnal ini akan membedah topik ini melalui beberapa lensa: pertama, Analisis Desain Kebijakan, dengan menganalisis dokumen perencanaan dan program kerja Pemkot Tangerang untuk mengidentifikasi bagaimana model kemitraan dirumuskan, serta sejauh mana model tersebut selaras dengan teori pemberdayaan yang visioner. Kedua, Analisis Implementasi, dengan meneliti proses implementasi di lapangan, mengidentifikasi aktor-aktor kunci (birokrasi, korporasi, asosiasi UMKM), dan mengungkap hambatan (birokratis, kultural, ekonomi) dalam memfasilitasi kemitraan. Ketiga, Analisis Dampak (Efektivitas), dengan mengevaluasi outcome dari kemitraan yang telah terbentuk dari perspektif pelaku UMKM, mengukur dampaknya terhadap peningkatan omzet, perluasan pasar, penyerapan tenaga kerja, dan yang terpenting peningkatan kemandirian usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi studi Pemerintahan Daerah, khususnya dalam merumuskan model intervensi kebijakan UMKM yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan benar-benar memberdayakan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain Studi Kepustakaan (Library Research) untuk menganalisis efektivitas upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemitraan UMKM sebagai salah satu instrument pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kota Tangerang. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder seperti dokumen perencanaan kebijakan Pemkot Tangerang (RJPMMD, program "Tangerang Emas"), data BPS dan Dinas Koperasi, serta literatur akademik terkait teori pemberdayaan modern. Analisis akan berfokus pada tiga kacamata utama: (1) Analisis desain kebijakan untuk mengevaluasi perumusan model kemitraan; (2) Analisis implementasi untuk mengidentifikasi proses dan hambatan di lapangan; dan (3) Analisis dampak untuk mengevaluasi outcome kemitraan yang terbentuk dari perspektif pemberdayaan berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi (Content Analysis) dari sumber-sumber data. Data akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi perbandingan atau naratif komparatif, dan penarikan kesimpulan untuk memverifikasi sejauh mana realisasi visi pemberdayaan Pemkot Tangerang telah terealisasi dalam bentuk kemitraan yang nyata dan memberdayakan pelaku UMKM. Tujuannya adalah memberikan kontribusi empiris dalam merumuskan model intervensi kebijakan UMKM yang selaras dengan teori pemberdayaan yang menekankan peran pemerintah

sebagai fasilitator dan enabler, bukan hanya penyedia (provider).



**Gambar 1. Diagram Metode Penelitian**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program “Tangerang Emas” adalah program lanjutan Pemerintah Kota Tangerang bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (DISINDAGKOPUKM) yang awalnya adalah program hibah bantuan kepada pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Program Tangerang Emas dibuat untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Dengan adanya program ini, pemerintah berusaha untuk memperbaiki ekonomi lokal dan menawarkan akses ke modal yang lebih baik bagi para pelaku usaha.

Dasar hukum untuk program pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang untuk tahun 2019-2023. Dokumen ini berperan sebagai kerangka hukum makro yang menjelaskan visi, misi, dan program dari kepala daerah. Dalam konteks hukum, RPJMD ini menjadi "acuan" bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kota Tangerang dan berfungsi sebagai referensi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih rinci, seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Keberadaan Perda ini menegaskan adanya komitmen secara resmi dari pemerintah daerah serta arah strategis untuk melaksanakan program pembangunan, termasuk dalam bidang ekonomi masyarakat.

Komitmen strategis yang terdapat dalam RPJMD kemudian dijabarkan ke dalam peraturan yang lebih terperinci dan operasional. Salah satu contoh nyata adalah Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 56 Tahun 2022, yang berfungsi sebagai "Panduan Teknis untuk Pemberian Hibah dalam Bentuk Bantuan Modal". Perwal ini dikembangkan dengan tujuan spesifik sebagai dasar hukum untuk intervensi ekonomi langsung dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Peraturan ini merujuk pada undang-undang nasional yang lebih tinggi, seperti UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM dan PP No. 7 Tahun 2021.

Analisis mengenai desain kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang menunjukkan penekanan yang jelas pada isu permodalan. Bukti utama dari Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 56 Tahun 2022 menunjukkan bahwa program unggulan dirancang secara langsung sebagai "Pedoman Teknis Pemberian Hibah Dalam Bentuk Bantuan Modal". Program tersebut merupakan respons dari Pemkot untuk memulihkan ekonomi setelah pandemi, dengan cara memberikan "bantuan Pemerintah Daerah berupa uang" sebesar Rp 5.000.000 untuk setiap Kelompok Usaha Mikro. Temuan ini memberikan jawaban yang jelas pada pertanyaan penelitian mengenai desain program yang ada secara khusus tidak memanfaatkan instrumen kemitraan strategis (menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar), melainkan lebih mengedepankan bantuan modal. Hal ini menjadi poin menarik, terutama karena dalam struktur kelembagaan, urusan perindustrian (industri besar) dan urusan UMKM berada dalam satu lembaga, yaitu Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebuah struktur yang secara teoritis seharusnya mempermudah pembentukan kemitraan.

**Tabel 1. Penerima Program Tangerang Emas 2020-2025.**

| Program / Bantuan                              | Jenis Bantuan                        | Jumlah Penerima / Target                          | Sumber Data / Tahun                                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bantuan Modal (Uang/Pinjaman)                  |                                      |                                                   |                                                                       |
| Program Tangerang Emas                         | Bantuan Modal (Pinjaman tanpa bunga) | 305 UMKM (Total kuota 520)                        | Laporan 2020-2022                                                     |
| Program Tangerang Emas                         | Bantuan Modal (Realisasi)            | 280 UMKM (Total Rp 573 juta)                      | Laporan 2021                                                          |
| Bantuan Modal (Kemiskinan Ekstrem)             | Bantuan Modal (Hibah Uang Tunai)     | 102 Keluarga (Rp. 20 Juta)                        | Laporan 2024                                                          |
| Bantuan Modal BAZNAS                           | Bantuan Modal (Hibah Uang Tunai)     | 4 Pelaku UMKM                                     | Laporan 2025                                                          |
| Hibah Modal (Perwal 56/2022)                   | Bantuan Modal (Hibah Uang Tunai)     | Rp. 5.000.000 per Kelompok (1 Kelompok = 5 orang) | Perwal No. 56 Tahun 2022 (Dokumen yang Anda unggah)                   |
|                                                |                                      |                                                   |                                                                       |
| Bantuan Fasilitas (Jasa, Legalitas, Pelatihan) |                                      |                                                   |                                                                       |
| Fasilitas Peningkatan Kompetensi               | Jasa (Merek, Halal, Barcode, dll.)   | 829 UMKM (Total)                                  | Laporan Capaian 2024                                                  |
| ↳ Fasilitas Merek                              | Jasa (Legalitas Merek)               | 270 UMKM                                          | Laporan Capaian 2024                                                  |
| ↳ Fasilitas Barcode                            | Jasa (Barcode Produk)                | 300 UMKM                                          | Laporan Capaian 2024                                                  |
| ↳ Fasilitas Halal                              | Jasa (Sertifikasi Halal)             | 84 UMKM                                           | Laporan Capaian 2024                                                  |
| Pelatihan & Sertifikat SDM                     | Jasa (Pelatihan)                     | 400 UMKM                                          | Laporan 2024                                                          |
| Kepemilikan NIB                                | Jasa (Legalitas Usaha)               | 58.692 UMKM (Total pemilik NIB)                   | Laporan per Maret 2024                                                |
| UMKM Awards (Kurasi)                           | Jasa (Kurasi Produk)                 | 105 Produk                                        | Laporan 2024                                                          |
| Program Pengembangan Usaha Mikro               | Jasa (Fasilitas/Pelatihan Manajemen) | 200 Orang (Target)                                | Laporan Kinerja Triwulan IV Disindagkopukm (Dokumen yang Anda unggah) |
|                                                |                                      |                                                   |                                                                       |
| Bantuan Barang (Peralatan)                     |                                      |                                                   |                                                                       |
| Bantuan BAZNAS                                 | Bantuan Barang (Gerobak)             | 1 Orang (disebutkan spesifik)                     | Laporan 2025                                                          |
| Bantuan Disabilitas                            | Bantuan Barang (Alat Bantu)          | Jumlah tidak spesifik                             | Laporan 2024                                                          |

Sumber: JDIH Kota Tangerang & DISINDAGKOPUKM Kota Tangerang

Program ini secara konsisten diakui oleh para peneliti sebagai alat pendanaan. Tangerang Emas dijelaskan sebagai "program kredit usaha" (Rahmawati, 2024) atau "program pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan" (Tania *et al.*, 2023) yang disalurkan melalui kerjasama dengan Bank BJB. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan "akses permodalan" (Rahmawati, 2024) dan membantu UMKM terhindar dari pinjaman ilegal (Tania *et al.*, 2023). Oleh karena itu, jawaban



untuk pertanyaan penelitian pertama (RQ1) adalah tidak. Desain program utama dari Pemkot Tangerang tidak berorientasi pada alat kemitraan strategis, melainkan lebih pada alat pendanaan.

Apabila melihat desain kebijakan ini melalui lensa teoretis yang diusulkan sebelumnya, terlihat bahwa peran Pemkot belum sepenuhnya berkembang. Teori pemberdayaan modern (Jim Ife) menunjukkan pentingnya pergeseran peran pemerintah dari "penyedia" menjadi "fasilitator" dan "enabler". Desain program hibah modal (Perwal 56 2022) dan kredit lunak ("Tangerang Emas") menempatkan Pemkot sebagai "penyedia" sumber daya. Model kemitraan dalam program Tangerang Emas terbatas pada kemitraan antara Pemerintah, Bisnis (Bank BJB), dan Komunitas (UMKM) untuk pendistribusian modal (Tania *et al.*, 2023), bukan merefleksikan model Penta-Helix yang menciptakan kolaborasi rantai pasok antara UMKM dan ribuan industri besar. Temuan ini memiliki konsekuensi yang mendesak. Analisis ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kebijakan: intervensi kebijakan saat ini tidak dirancang untuk mengatasi masalah struktural yang menghalangi UMKM "naik kelas", yakni lemahnya integrasi pasar.

Namun, menyebut program ini sebagai "model lama" juga tidak sepenuhnya tepat. Intervensi Pemkot tidak terbatas pada "bantuan alat acak" atau "pameran simbolis" (kritik yang kadang terdengar di media). Sebaliknya, Pemkot menggabungkan strategi pendanaan dengan pendekatan yang lebih sistematis. Penelitian mengenai strategi Pemkot (Maharani *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa "fase awal" (konsultasi dan pelatihan) telah berjalan "cukup baik". Pelatihan ini mencakup kebutuhan modern seperti "pelatihan pemasaran digital, pelatihan administrasi keuangan, [dan] pengembangan merek". Hal ini sejalan dengan temuan Laporan Kinerja Triwulan IV DISINDAGKOPUKM yang menargetkan "Pelatihan Manajemen" dan penelitian lain yang mengedepankan program "Fasilitasi Sertifikasi Halal" sebagai program kunci (Tania *et al.*, 2023). Secara keseluruhan, strategi Pemkot berfokus pada mengatasi hambatan internal UMKM (modal, legalitas, keterampilan), tetapi masih belum memanfaatkan peluang eksternal yang ada: kemitraan dengan industri.

Secara visioner, tampaknya kebijakan masa depan mulai menyadari adanya kesenjangan ini. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk Kota Tangerang tahun 2024-2026, yang diputuskan melalui Perwal Nomor 15 Tahun 2023, dengan jelas menyoroti "Pola kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar belum berjalan dengan baik" sebagai salah satu isu penting daerah. Pengakuan resmi dalam dokumen perencanaan ini merupakan langkah penting. Ini menunjukkan bahwa birokrasi menyadari bahwa model "Tangerang Emas" (permodalan) dan dukungan legalitas, meskipun mendapatkan pengakuan, masih kurang memadai. RPD 2024-2026, yang mengutamakan "perekonomian yang maju dan kompetitif", serta didorong oleh inisiatif terbaru Pemkot untuk secara aktif "bekerja sama dengan pelaku usaha besar bersama UMKM" (TangerangKota.go.id, 2024), menunjukkan adanya perubahan cara berpikir. Masa depan pengembangan UMKM di Kota Tangerang kini bukan hanya soal memberikan modal, tetapi lebih kepada membangun kerja sama, menjalin "potensi sinergi luar biasa" antara ribuan industri dan ratusan ribu UMKM yang selama ini hidup berdampingan namun belum saling terhubung.

### **Analisis Implementasi: Mengurai Gesekan Kemitraan UMKM di Kota Tangerang**

Dalam pengimplementasian program pemberdayaan UMKM oleh Pemkot Tangerang, seperti program "Tangerang Emas" tentunya menghadapi berbagai tantangan yang fundamental. Pemkot Tangerang mencatat terdapat 58.692 pelaku UMKM binaan Disperindagkop UKM Kota Tangerang yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), belum lagi UMKM yang tidak memiliki NIB. Namun, data tersebut tidak secara jelas mengklasifikasikan kondisi UMKM secara de facto, seperti berapa banyak yang aktif memproduksi, berapa banyak yang siap naik kelas, dan

berapa banyak yang sudah tidak beroperasi. Kondisi ini menjadi sebuah paradoks kuantitas di mana keberhasilan dalam pendataan justru mengaburkan realitas dilapangan. Kegagalan kurasi yang terjadi dapat berujung pada implikasi pada inefisiensi alokasi sumber daya, karena intervensi program memiliki resiko disalurkan secara merata pada UMKM yang sudah tidak beroperasi atau yang tidak memiliki potensi pertumbuhan (naik kelas).

Gesekan semakin tajam ketika penerbitan NIB menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam keberhasilan program pemberdayaan. Pemkot memang berhasil dalam memenuhi target birokrasi tetapi UMKM mikro maupun informal mendapatkan beban administrative tanpa insentif ekonomi langsung. Belum terdapat penjelasan mengenai korelasi yang dirasakan secara langsung oleh UMKM antara memiliki NIB dengan peningkatan omzet harian, sehingga kepemilikan NIB bukan menjadi urgensi dan kepentingan para pemilik UMKM. Keberhasilan program melalui indicator output dilihat dari jumlah UMKM yang dilatih, NIB yang terbit atau bantuan yang didistribusikan. Tetapi UMKM menuntut outcome seperti peningkatan omzet, pasar bertambah luas dan efisiensi produksi. Ini memperlihatkan adanya perbedaan makna “sukses” atau keberhasilan antara Pemkot Tangerang dengan pelaku UMKM.

Program Tangerang Pelaku Usaha Naik Kelas (TUNAS) dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) menjadi realitas kedua yang teridentifikasi menjadi program yang cenderung homogenitas karena kegagalan kurasi data di awal. Kedua program ini menunjukkan sifatnya yang memukul rata seluruh UMKM, bentuk pelatihan digital marketing, manajemen keuangan dasar dan pengemasan memang menjadi dasar pengetahuan yang membutuhkan pembinaan. Tetapi ada beberapa hal penting yang dibutuhkan UMKM selain keterampilan tersebut, yaitu kebutuhan spesifik seperti pengetahuan mengenai sertifikasi halal, logistic frozen food, atau akses bahan baku impor sehingga program ini dianggap kurang memfasilitasi spesialisasi atau penciptaan nilai tambah.

Selain itu alur komunikasi antara pemerintah dengan UMKM masih terbatas, saluran yang digunakan bersifat formal satu arah yang dikhususkan untuk sosialisasi program seperti website resmi [tangerangkota.go.id](http://tangerangkota.go.id), media social dinas, atau surat edaran dari aparaturnya baik kecamatan maupun kelurahan. Tetapi UMKM dari skala mikro lebih banyak mendapatkan sumber informasi dari jaringan informal seperti komunitas atau grup Whatsapp dan dari mulut ke mulut. Kesenjangan saluran komunikasi ini menyebabkan beberapa informasi penting mengenai program yang dijalankan tidak terdistribusi dan tersampaikan dengan baik sehingga partisipan yang mengikuti program cenderung itu-itu saja. Secara tidak sengaja ini akan menciptakan “elite informasi” di kalangan UMKM, di mana hanya UMKM yang proaktif, memiliki koneksi, dan terafiliasi dengan asosiasi binaan saja yang secara konsisten mendapatkan informasi program. Hal ini dapat berisiko pada peningkatan kesenjangan antara UMKM yang terhubung dan yang terputus.

### **Evaluasi Dampak Program Kemitraan terhadap Pemberdayaan UMKM: Perspektif Pelaku Usaha**

Untuk melihat apakah program yang dijalankan pemerintah, termasuk yang disebut sebagai kemitraan benar-benar berdampak bagi UMKM atau tidak. Dari hasil analisis sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar program Pemkot Tangerang masih fokus pada bantuan modal, legalitas, dan pelatihan umum. Tetapi dari sudut pandang UMKM, pemberdayaan tidak hanya diukur dari banyaknya pelatihan atau sertifikat yang diterima, tetapi dari seberapa besar usaha mereka berkembang secara nyata.

Bagi UMKM, program pemberdayaan dianggap berhasil jika dapat meningkatkan omzet, pelanggan, jangkauan pasar, dan kemampuan usaha untuk bertahan tanpa ketergantungan pada bantuan. Hasil penelitian Ardian & Yuniarti (2021) serta Susanto & Rakhmadi (2024)

menunjukkan bahwa UMKM hanya dapat berkembang secara signifikan jika terhubung ke kemitraan pasar yang jelas, misalnya menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan besar atau mendapat permintaan reguler dari mitra bisnis. Artinya, pelatihan dan fasilitas administrasi memang berguna, tetapi belum cukup untuk membuat UMKM naik kelas.

Jika melihat kondisi di Kota Tangerang, sebagian besar UMKM merasakan manfaat program, seperti kemudahan mendapat legalitas, tambahan modal, atau pelatihan dasar. Tetapi manfaatnya masih terbatas pada level pengetahuan dan kelengkapan administrasi, tanpa ada dampak besar terhadap peningkatan pendapatan atau kemudahan akses pasar. Menurut Rahmawati (2024) program bantuan modal memang membantu UMKM bertahan, tetapi belum bisa meningkatkan daya saing secara keseluruhan. Program kemitraan yang berjalan cenderung lebih pada kolaborasi administrasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan, bukan kemitraan usaha yang bisa memberikan peluang pasar baru bagi UMKM.

Banyak juga pelatihan yang diberikan masih bersifat umum dan cenderung sama untuk semua UMKM. Beberapa pelaku usaha membutuhkan pengetahuan atau akses yang lebih spesifik, seperti fasilitas sertifikasi halal, mekanisme suplai bahan baku, atau informasi untuk masuk ke jaringan retail dan industri. Dari hasil penelitian Putra (2023) menemukan kekurangan dari pelatihan yang kurang spesifik dan akhirnya tidak berdampak pada perkembangan UMKM. Akibatnya, muncul perbedaan cara pandang antara pemerintah dan UMKM dalam menilai keberhasilan program. Pemerintah mengukur tingkat keberhasilan dari angka, seperti berapa banyak UMKM yang dilatih, berapa NIB yang diterbitkan, dan berapa bantuan yang sudah tersalurkan. Sedangkan UMKM mengukur keberhasilan dari hasil nyata dalam usaha mereka, seperti peningkatan penjualan dan terbukanya pasar baru. Perbedaan ini membuat sebagian UMKM merasa bahwa program pemerintah membantu, tetapi belum memberikan perubahan besar terhadap usaha mereka.

Secara esensial, dari perspektif pelaku UMKM, program-program yang berjalan saat ini belum sepenuhnya memberdayakan. Program sudah memberikan landasan, tetapi belum cukup untuk membawa UMKM ke tahap pertumbuhan yang lebih tinggi. UMKM tetap berada di posisi yang sama tanpa adanya perubahan yang besar jika tidak ada kemitraan yang benar-benar mempertemukan UMKM dengan perusahaan besar, pasar baru, atau rantai pasok yang stabil dan UMKM hanya berkembang di atas kertas, tetapi tidak meningkat sepenuhnya dalam praktiknya. Hidayat (2024) menegaskan bahwa tantangan terbesar UMKM saat ini bukan lagi soal modal, tetapi minimnya integrasi dengan pasar dan industri.

Oleh karena itu, program kemitraan harus diarahkan lebih jauh, tidak hanya pada pendanaan atau pelatihan, tetapi juga pada pembukaan akses pasar dan kolaborasi usaha yang substansial. Tanpa itu, pemberdayaan yang terjadi baru sebatas administratif, belum menyentuh persoalan inti yang dihadapi UMKM untuk benar-benar naik kelas.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui program-program seperti “Tangerang Emas”, fasilitasi legalitas, dan berbagai pelatihan, telah memberikan manfaat terutama pada aspek modal, administrasi, dan peningkatan kapasitas dasar. Namun, program-program tersebut belum efektif dalam mendorong UMKM naik kelas karena belum berfokus pada pembentukan kemitraan strategis dengan industri besar maupun akses pasar yang lebih luas.

Di tingkat implementasi, masalah seperti data UMKM yang tidak akurat, homogenitas pelatihan, serta komunikasi satu arah menghambat jangkauan dan ketepatan sasaran program. Dari



perspektif pelaku UMKM, pemberdayaan yang terjadi masih bersifat administratif dan belum menghasilkan peningkatan omzet atau perluasan pasar secara signifikan. Dengan demikian, Pemkot Tangerang perlu mengalihkan pendekatan dari sekadar penyedia bantuan menjadi fasilitator kemitraan bisnis yang konkret agar pemberdayaan UMKM lebih berkelanjutan dan berdampak langsung pada pertumbuhan usaha.

## DAFTAR REFERENSI

- Anwar, M. (2020). *Model kemitraan bisnis antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Sasanti Institute.
- B, M. (2024). Memperkuat UMKM di Kelurahan Benteng melalui pelatihan inovatif. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(September), 7–10.
- B, N. T., Santoso, S., & Hulu, A. K. (n.d.). *Potential role analysis of halal certification facilitation and Tangerang Emas program activation to increase culinary micro business income in Tangerang City*. Tangerang: Atlantis Press International BV. doi:10.2991/978-94-6463-008-4
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang. (n.d.). *Laporan capaian kinerja triwulan IV*. Tangerang: Penulis.
- Febriano Ramadhan, E. R. G. (2023). Pengawasan kemitraan oleh KPPU sebagai upaya peningkatan kesejahteraan UMKM. *Jurnal Ensiklopedia*, 5(4), 618–623.
- Ginanjar, G. G., Muda, G., & Fitriyani. (2025). Analisis faktor penghambat UMKM di Kabupaten Garut. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 19(12).
- Hastuti, P., Nurofik, A., & A., P. (2020). *Kewirausahaan UMKM* (A. Rikki, Ed.). Bandung: Yayasan Kita Menulis.
- Septiana, H. (2025). Strategi kebijakan dalam mendukung pengembangan UMKM di Kota Cilegon. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(September), 201–221.
- Irawan, D. (2020). Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah melalui jaringan usaha. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, X(2), 103–116.
- Maharani, Y. S., Syamsudin, U., & F., F. (2024). Strategi Pemerintah Kota Tangerang terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 922–927.
- Nursasi, A., Hanifah, N., & Handani, R. T. (2024). Implementasi kebijakan integrasi ekonomi dan dampaknya terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(12), 429–440.
- Pemerintah Kota Tangerang. (2019). *Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023*. Tangerang: Lembaran Daerah Kota Tangerang.
- Pemerintah Kota Tangerang. (2022). *Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Dalam Bentuk Bantuan Modal Kepada Kelompok Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Tangerang: Berita Daerah Kota Tangerang.
- Pemerintah Kota Tangerang. (2023). *Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah*. Tangerang: Berita Daerah Kota Tangerang.

- Pratama, G., Atmaja, D. R., & Mukmin, A. H. (2024). Kemitraan pendidikan dan pengembangan kapabilitas dinamis UMKM guna meningkatkan ekspor melalui manajemen produksi berkualitas. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 7(204), 82–91. doi:10.33474/jipemas.v7i1.21040
- Rahmawati, S. (2024). Implementation of the Tangerang Emas (prosperous community economy) program for micro business actors in Pinang Sub-District, Tangerang City. *International Journal of Social Sciences Review*, 5(9).
- Saragih, S., Nur, N., Junita, I., Kristine, F., Mariana, A., Widiastuti, R., & Lu, C. (2024). Penguatan daya saing UMKM melalui pelatihan manajemen kualitas (Strengthening the competitiveness of MSMEs through quality management training). *Yumary: jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 337–346.
- Suvianti, E., Aprilia, T. D., Cahyati, N. A., & Saputri, E. (2025). Dinamika struktur pasar dan tantangan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 209–218.
- Suwardiyati, R., & Ganindha, R. (2023). Sinergi pengawasan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai upaya peningkatan potensi dalam dunia usaha ekonomi kreatif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 651–672.
- Wikantari, M. A., & Supriadi, Y. N. (2022). Peningkatan kewirausahaan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan UMKM. *Batara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services*, 2(2), 262–269. doi:10.53363/bw.v2i2.96
- Zia, H. (2020). Pengaturan pengembangan UMKM di Indonesia. *RIO Law Jurnal*, 1(1).